



**INDIKATOR  
KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KABUPATEN BLORA  
2016-2017**



## INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN BLORA 2016-2017

ISBN : -  
Nomor Publikasi : 33165.003  
Katalog BPS : 4102004.3316  
Ukuran Buku : 18,2 cm x 25,7 cm  
Jumlah Halaman : vi + 37 halaman

Naskah :

Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Blora

Gambar Kulit :

Seksi Nerwilis BPS Kabupaten Blora

Diterbitkan oleh:

© BPS Kabupaten Blora

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik**

## KATA PENGANTAR

Buku Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Blora 2016-2017 merupakan publikasi yang akan diterbitkan secara tahunan oleh BPS Kabupaten Blora. Publikasi ini menggunakan data yang utamanya bersumber dari Blora Dalam Angka, Indikator Kesra hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

Publikasi ini menyajikan perkembangan indikator kesejahteraan sosial yang mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perumahan, serta konsumsi dan pengeluaran rumah tangga. Data akan disajikan untuk series tahun 2016 dan 2017 agar terlihat bagaimana tren perkembangan data-data tersebut.

Dengan terbitnya publikasi ini, diharapkan dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan data kesejahteraan rakyat. Kepada semua pihak yang telah berkontribusi atas terbitnya publikasi ini kami ucapkan terima kasih.

Blora, Desember 2018

Kepala BPS Kabupaten Blora



**Drs. HERU PRASETYO**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA.....	1
1.1. Kondisi Wilayah .....	1
1.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk .....	1
1.3. Rasio Jenis Kelamin .....	2
1.4. Struktur Umur .....	3
1.5. Rasio Ketergantungan .....	4
1.6. Umur Perkawinan Pertama dan Keluarga Berencana .....	5
BAB II KESEHATAN.....	9
2.1. Derajat Kesehatan Masyarakat .....	9
2.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan .....	12
2.3. Penggunaan Jaminan Kesehatan .....	14
BAB III PENDIDIKAN .....	16
3.1. Tingkat Pendidikan .....	16
3.2. Angka Partisipasi Kasar .....	17
3.3. Angka Partisipasi Murni .....	18

BAB IV KETENAGAKERJAAN .....	20
4.1. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja .....	20
4.2. TPAK dan TPT .....	22
4.3. Lapangan Pekerjaan Utama .....	24
 BAB V PERUMAHAN .....	 26
5.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal .....	26
5.2. Kualitas Rumah tempat Tinggal .....	27
5.3. Fasilitas Rumah Tempat Tinggal .....	30
 BAB VI POLA KONSUMSI .....	 32
6.1. Pengeluaran Rumah Tangga .....	32
 BAB VII KEMISKINAN .....	 35
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin .....	36
7.2. Garis Kemiskinan.....	37

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Umur 10 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Blora, 2016 .....	17
Tabel 4.1. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Blora, 2015 dan 2017 .....	21
Tabel 6.1. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Kabupaten Blora, 2016-2017 .....	34
Tabel 7.1. Garis Kemiskinan di Kabupaten Blora dan Jawa Tengah Tahun 2012-2017 (Rp/Kapita/Bulan).....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2016-2017 .....	2
Gambar 1.2. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2016-2017 .....	3
Gambar 1.3. Rasio Ketergantungan Kabupaten Blora, 2016-2017 .....	4
Gambar 1.4. Persentase Penduduk Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Rata-rata Umur Kawin Pertama Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	6
Gambar 1.5. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	7
Gambar 1.6. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Alat KB yang Sedang Digunakan Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	8
Gambar 2.1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	10
Gambar 2.2. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu menurut Lama Terganggu Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	11
Gambar 2.3. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	12
Gambar 2.4. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Kabupaten Blora, 2016 .....	13

Gambar 2.5. Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat/Cara Berobat Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	14
Gambar 2.6. Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	15
Gambar 3.1. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Blora, 2016-2017 .....	18
Gambar 3.2. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Blora, 2016-2017 .....	19
Gambar 4.1. Persentase Penduduk Umur 15 tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu Kabupaten Blora, 2014-2015 dan 2017 .....	21
Gambar 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blora, 2014-2015 dan 2017 .....	23
Gambar 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora, 2012-2015 dan 2017 .....	24
Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	27
Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	29
Gambar 5.3. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	30
Gambar 5.4. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan Kabupaten Blora, 2015-2016 .....	31
Gambar 6.1. Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan (dalam Rupiah) menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Blora, 2016-2017 .....	33
Gambar 7.1. Prosen Penduduk Miskin Kabupaten Rembang (%) Tahun 2012-2017 .....	36

# BAB I

## KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA

**K**ependudukan berkaitan erat dengan dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar berpotensi bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan bila dibarengi dengan kualitas yang mumpuni. Sebaliknya, penduduk dapat menjadi penghambat pembangunan bila memiliki kualitas yang rendah. Selain masalah kualitas sumber daya manusia, kepadatan penduduk, tingkat ketergantungan, dan pertumbuhan penduduk merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan

### 1.1. Kondisi Wilayah

Kabupaten Blora terletak di ujung paling timur Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Blora berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan di sebelah barat, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati di sebelah utara, Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur di sebelah timur, dan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur di sebelah selatan.

Kabupaten Blora terdiri atas 16 Kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Blora tercatat sebesar 182.059 hektar, dimana hampir separuhnya merupakan daerah hutan.

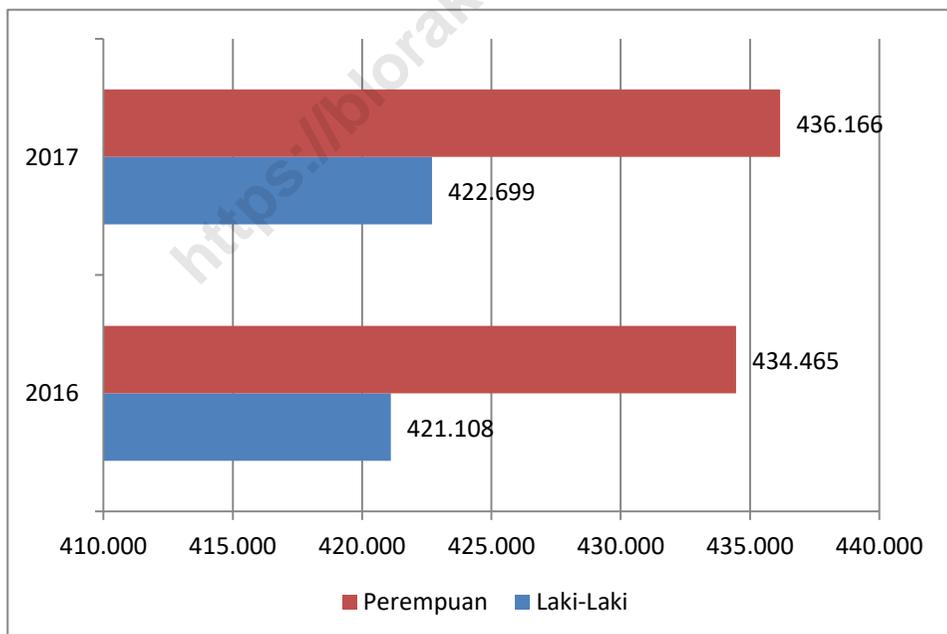
### 1.2. Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Blora pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 858.865 jiwa. Jumlah ini meningkat 0,38 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 855.573 jiwa. Dengan luas sekitar 1.820 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk kabupaten Blora mencapai 472 jiwa/km<sup>2</sup>. Sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk, kepadatan penduduk ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 470 jiwa/km<sup>2</sup>.

### 1.3. Rasio Jenis Kelamin

Komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan bahwa penduduk Blora masih didominasi oleh penduduk perempuan. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin yang berkisar pada 96 sampai 98 pada kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Pada tahun 2017, Rasio Jenis Kelamin tercatat sebesar 96,91 artinya, dalam setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sebanyak 97 orang penduduk laki-laki. Secara absolut, jumlah penduduk perempuan pada tahun 2017 mencapai 436.166 jiwa, sementara penduduk laki-laki mencapai 422.699 jiwa.

Gambar 1.1. Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2016-2017



Sumber: BDA Kabupaten Blora, 2018

#### 1.4. Struktur Umur

Struktur penduduk Blora mengalami transisi menuju penduduk tua. Hal ini ditandai dengan semakin berkurangnya penduduk kelompok usia muda (0-14 tahun) dan semakin bertambahnya penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) dan kelompok usia tua (65 tahun ke atas).

Gambar berikut memperlihatkan distribusi penduduk menurut umur, dimana pada tahun 2017 22,42 persen penduduk berusia muda, 68,16 persen penduduk berusia produktif dan hanya 9,42 persen penduduk yang berusia tua. Komposisi ini tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana 22,67 persen penduduk berusia muda, 68,07 persen penduduk berusia produktif, dan 9,26 persen sisanya berusia tua.

Gambar 1.2. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2016-2017

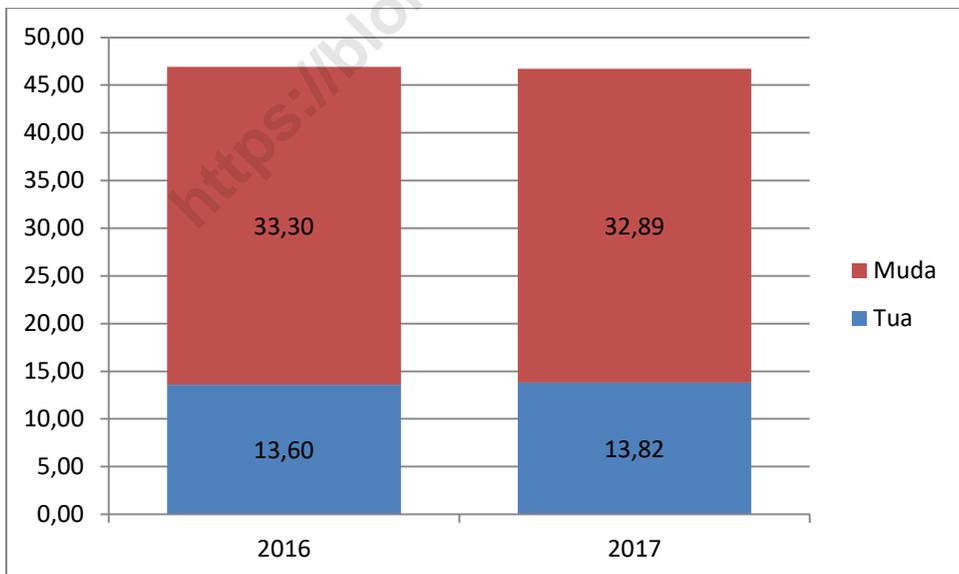


Sumber: BDA Kabupaten Blora, 2018

### 1.5. Rasio Ketergantungan

Pengelompokan data penduduk menurut umur salah satunya berguna dalam bidang ekonomi. Penduduk dapat dikelompokkan menjadi penduduk usia produktif atau tidak produktif. Penduduk usia produktif merupakan penduduk usia 15-64 tahun, sedangkan penduduk tidak produktif terdiri atas penduduk muda (0-14 tahun) dan penduduk tua (65 tahun ke atas). Perbandingan kedua kelompok penduduk ini merupakan indikator rasio ketergantungan yang menunjukkan besarnya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk menunjang penduduk yang belum produktif maupun tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan, maka semakin besar hambatan atas upaya perkembangan daerah.

Gambar 1.3. Rasio Ketergantungan Kabupaten Blora, 2016-2017



Sumber: BDA Kabupaten Blora, 2018

Pada tahun 2017, rasio ketergantungan Kabupaten Blora secara umum mencapai 46,71, yang mencakup rasio ketergantungan penduduk

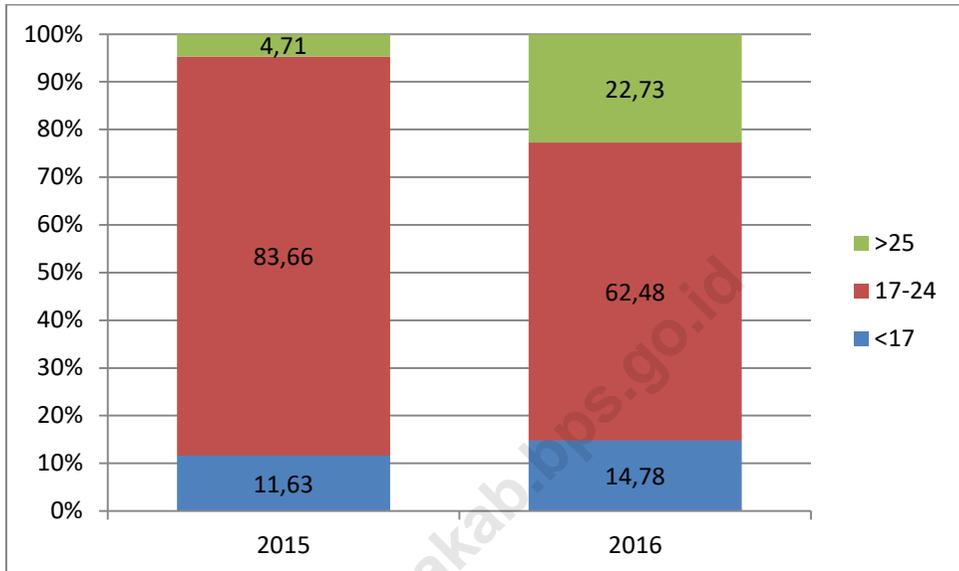
muda sebesar 32,89 dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 13,82 persen. Sementara itu, rasio ketergantungan penduduk pada tahun sebelumnya adalah sebesar 46,91 persen. Dengan kata lain, terjadi peningkatan proporsi penduduk usia produktif dalam kurun waktu 2016-2017.

#### 1.6. Umur Perkawinan Pertama dan Keluarga Berencana

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi jumlah penduduk. Kelahiran yang tinggi bila disertai dengan kematian yang rendah akan menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah penduduk. Tingginya angka kelahiran ini sangat berkaitan dengan usia perkawinan pertama. Umur perkawinan pertama ini merupakan umur pertama menikah untuk penduduk perempuan yang menandakan dimulainya masa reproduksi. Semakin muda usia seseorang saat melakukan perkawinan pertama, maka akan semakin panjang pula masa reproduksinya. Hal ini memungkinkan semakin banyak anak yang dilahirkan.

Pada tahun 2016, sebagian besar wanita berumur 10 tahun ke atas melakukan perkawinan pertama pada umur 17-24 tahun sebesar 62,48 persen. Sementara itu, 14,78 persen wanita yang melakukan perkawinan pertama pada umur 25 tahun ke atas. Bila dibandingkan dengan tahun 2015, terlihat adanya penurunan persentase wanita yang menikah di usia kurang dari 17 tahun. Hal ini menyebabkan persentase wanita yang menikah pada kelompok umur yang lebih tua mengalami peningkatan.

Gambar 1.4. Persentase Penduduk Wanita Umur 10 Tahun ke Atas yang Pernah Kawin menurut Rata-rata Umur Kawin Pertama Kabupaten Blora, 2015-2016



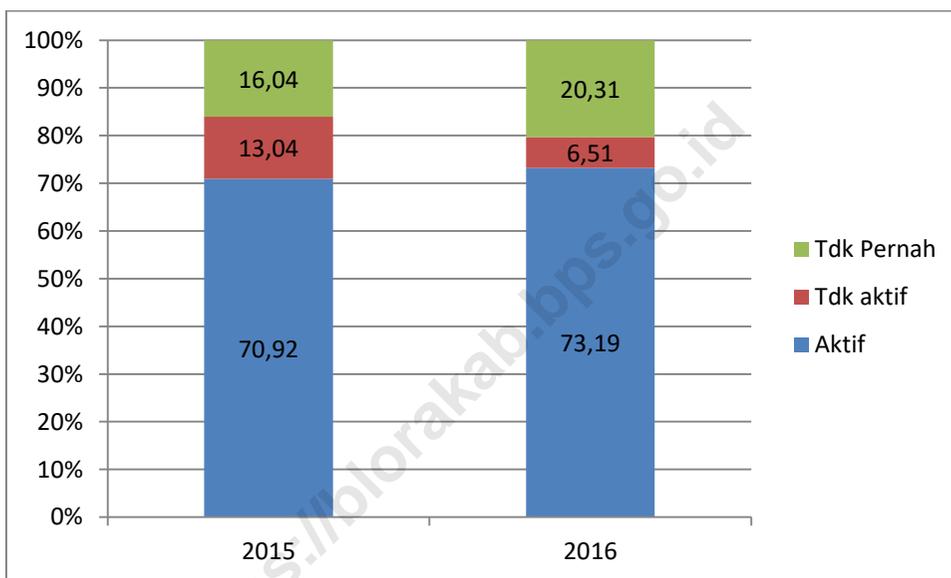
Sumber: Susenas 2015-2016

Sebagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, penerapan program keluarga berencana (KB) merupakan salah satu solusi selain dengan menunda umur perkawinan pertama. Program KB ditujukan untuk mewujudkan keluarga dengan usia kawin yang ideal, mengatur jarak kehamilan dan usia ideal melahirkan anak serta membina ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Untuk itu, masyarakat diharapkan turut berperan aktif dalam program ini melalui penggunaan alat kontrasepsi.

Berdasarkan gambar 1.5, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB sudah mencapai lebih dari 70 persen dalam kurun waktu 2015-2016. Pada tahun 2016 wanita umur 15-49 tahun yang pernah menggunakan alat kontrasepsi dan dan sekarang sudah tidak menggunakan lagi mencapai 20,31 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 16,04 persen.

Sementara itu, sisanya masing-masing sebesar 16,04 persen dan 20,31 persen tidak pernah menggunakan KB pada tahun 2015 dan tahun 2016.

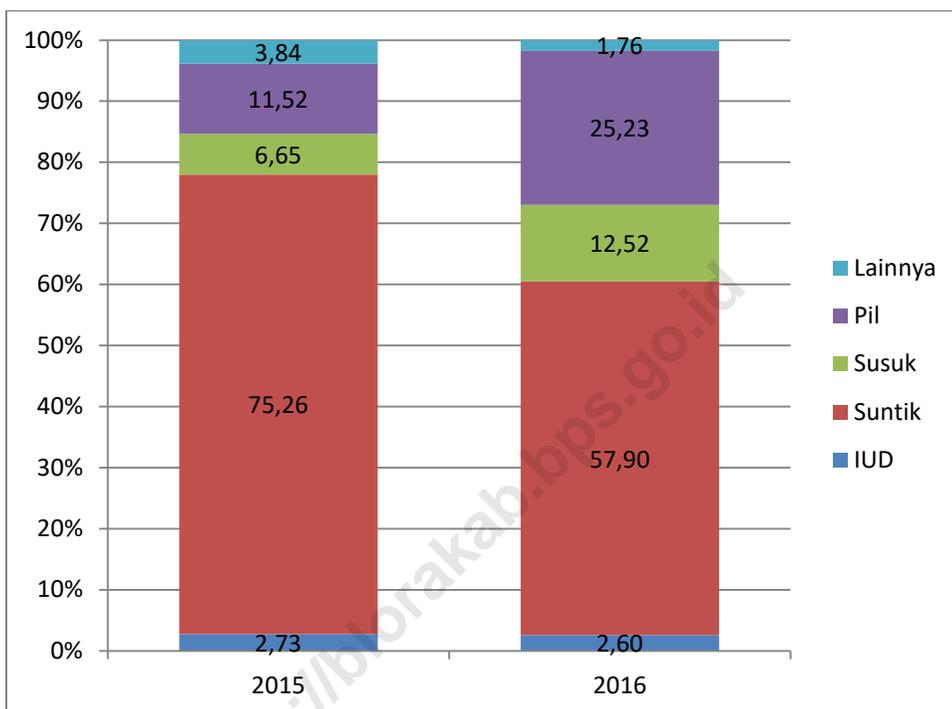
Gambar 1.5. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Status KB Kabupaten Blora, 2015-2016



Sumber: Susenas 2015-2016

Dari grafik berikut terlihat bahwa cara KB suntik masih menjadi pilihan utama wanita umur 15-49 tahun pengguna kontrasepsi. Pada tahun 2016 pengguna jenis KB suntik ini tercatat sebesar 57,90 persen. Pilihan kedua adalah pil KB yang mencapai lebih dari 25 persen. Sementara itu jenis KB lainnya masing-masing sebesar 12,52 persen untuk susuk, 2,60 persen untuk IUD dan 1,76 persen menggunakan cara KB lainnya .

Gambar 1.6. Persentase Wanita Umur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin menurut Alat KB yang Sedang Digunakan Kabupaten Blora, 2015-2016



Sumber: Susenas 2015-2016

# BAB II

## KESEHATAN

**K**esehatan merupakan salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Kesehatan juga terkait erat dengan pelaksanaan pembangunan nasional. Masyarakat yang memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik, dapat melakukan aktivitas secara produktif dalam proses pembangunan nasional. Apabila angka kesakitan pada penduduk terutama golongan usia produktif di suatu wilayah tinggi, maka akan dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah tersebut.

Upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah melalui program pembangunan, diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten, serta memberikan perlindungan sosial berupa jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti angka kesakitan dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang ditolong oleh tenaga medis waktu dilahirkan, persentase penduduk yang berobat ke pusat pelayanan kesehatan, dsb.

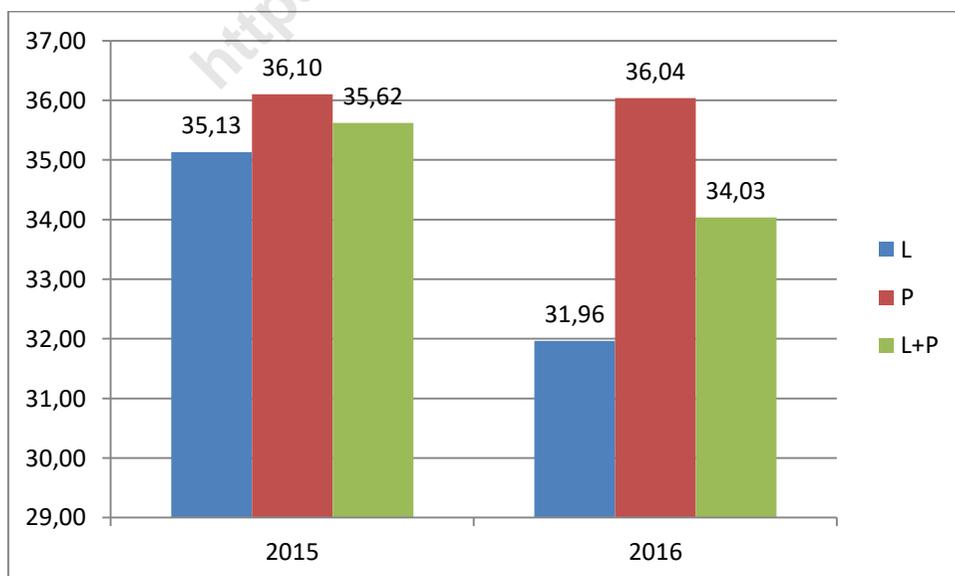
### 2.1. Derajat Kesehatan Masyarakat

Tingkat kesehatan penduduk dapat dilihat dari banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan angka morbiditas/kesakitan. Angka kesakitan didefinisikan sebagai persentase penduduk yang mengalami gangguan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktifitas sehari-hari yang terjadi baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus

rumah tangga ataupun kegiatan lainnya selama satu bulan sebelum pencacahan. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan menjadikan derajat kesehatan semakin rendah dan angka kesakitan semakin tinggi.

Grafik berikut memperlihatkan terjadinya penurunan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dari 35,62 persen pada tahun 2015 menjadi 34,03 persen tahun 2016. Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin dapat disimpulkan bahwa perempuan lebih banyak mengalami keluhan kesehatan dibanding laki-laki. Pada tahun 2015, persentase laki-laki yang mengalami keluhan kesehatan ada sebanyak 35,13 persen, menurun menjadi 31,96 persen pada tahun 2016. Sementara itu, persentase perempuan yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2015 sebesar 36,10 persen menjadi 36,04 persen pada tahun 2016.

Gambar 2.1. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dalam Satu Bulan Terakhir menurut Jenis Kelamin Kabupaten Blora, 2015-2016

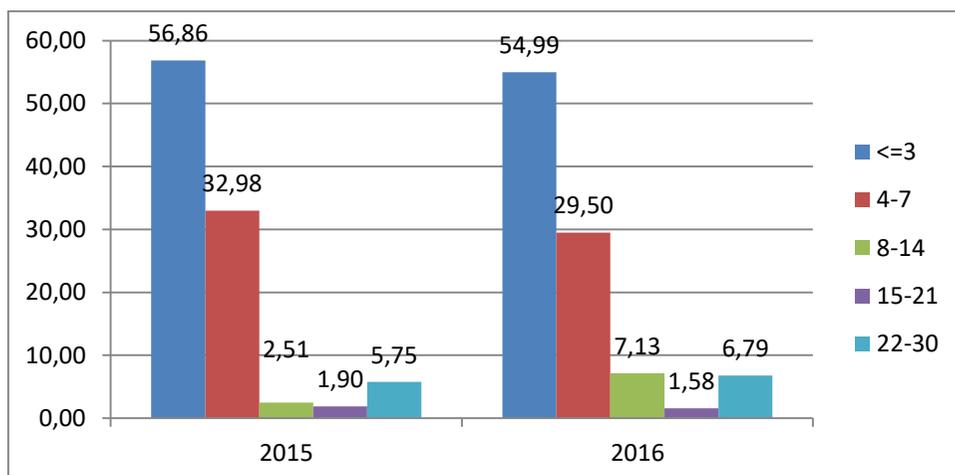


Sumber : Susenas 2015-2016

Lama terganggu merupakan salah satu indikator untuk menggambarkan kondisi keluhan kesehatan yang dirasakan penduduk. Semakin lama penduduk mengalami gangguan kesehatan, maka keluhan kesehatan tersebut diasumsikan semakin serius. Dengan demikian, meskipun angka kesakitan cukup rendah tidak serta merta dapat diartikan kondisi kesehatan cukup baik apabila tidak diiringi dengan sedikitnya lama terjadinya gangguan kesehatan.

Berdasarkan lamanya terganggunya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk mengalami keluhan kesehatan selama kurang dari 3 hari. Pada tahun 2015, persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan kurang dari 3 hari mencapai 56,86 persen, menurun menjadi 54,99 persen pada tahun 2016. Persentase penduduk dengan lama terganggu yang semakin besar terlihat semakin sedikit pada kurun waktu dua tahun tersebut, kecuali pada kelompok lama terganggu selama 22-30 hari.

Gambar 2.2. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Terganggu menurut Lama Terganggu Kabupaten Blora, 2015-2016



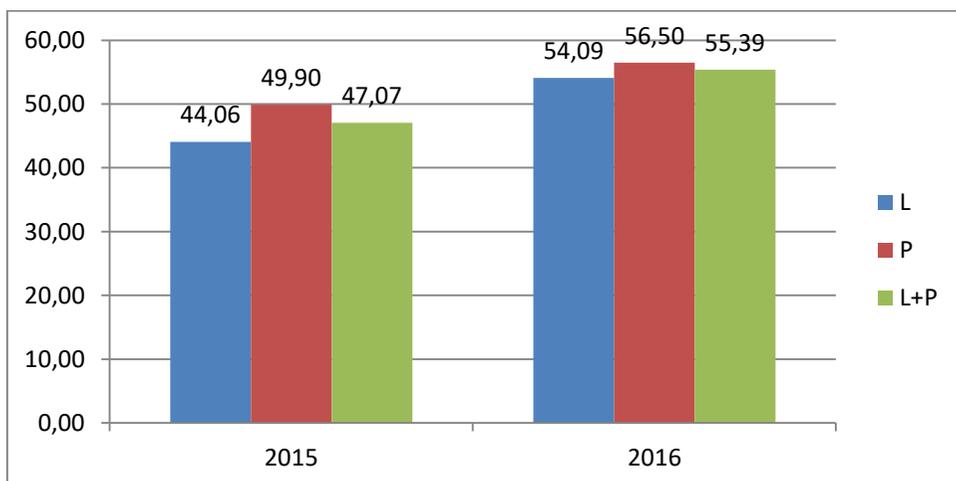
Sumber : Susenas 2015-2016

## 2.2. Pemanfaatan Fasilitas Kesehatan

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat juga turut dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan. Sarana kesehatan tersebut dapat berupa rumah sakit, Puskesmas, Pustu maupun praktik tenaga kesehatan lainnya. Beberapa hal dapat menjadi pertimbangan penduduk dalam memanfaatkan sarana kesehatan ini, diantaranya adalah jarak tempat tinggal ke sarana kesehatan, ketersediaan biaya dan kualitas pelayanan. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat pemanfaatan fasilitas kesehatan ini adalah banyaknya penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan ke fasilitas kesehatan.

Tercatat pada tahun 2016 ada sebanyak 55,39 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan berobat jalan, meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 47,07 persen. Berdasarkan jenis kelamin, terlihat persentase perempuan yang berobat jalan lebih banyak. Pada tahun 2016 perempuan yang berobat jalan sebesar 56,50 persen sedangkan laki-laki sebanyak 54,09 persen.

Gambar 2.3. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan menurut Jenis Kelamin Kabupaten Blora Tahun 2015- 2016

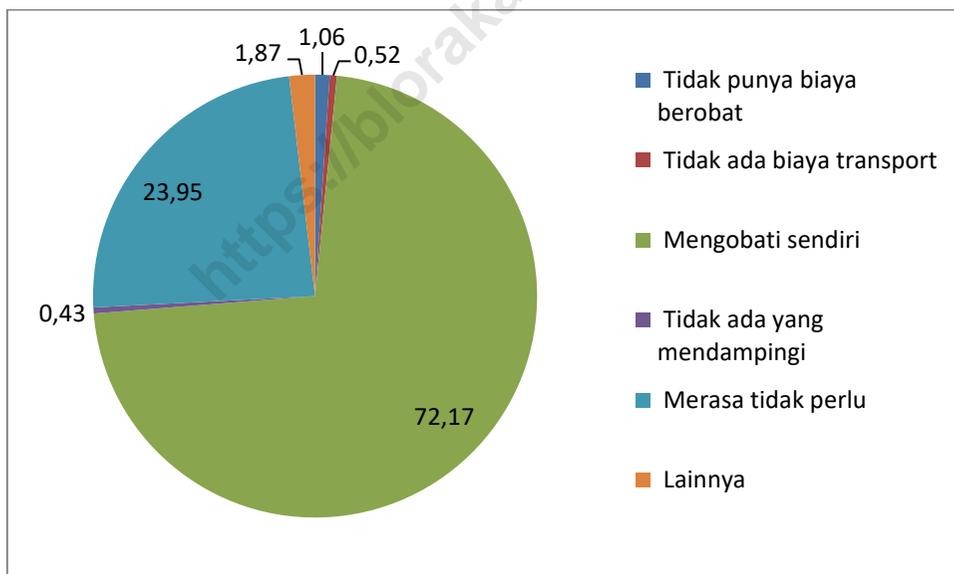


Sumber : Susenas 2015,2016

Secara umum, masih terdapat 44,61 persen penduduk yang tidak berobat jalan. Biasanya mereka melakukan pengobatan sendiri atau bahkan tidak berobat sama sekali. Berikut adalah berbagai alasan yang menyebabkan penduduk tidak memutuskan untuk berobat jalan (gambar 2.4).

Dari sejumlah penduduk yang tidak berobat jalan, 72,17 persennya melakukan pengobatan sendiri. Sementara itu 23,95 persen merasa tidak perlu berobat. Beberapa alasan tidak melakukan berobat jalan lainnya yaitu tidak punya biaya berobat (1,06 persen), tidak ada yang mendampingi (0,52 persen) dan lainnya (1,87 persen).

Gambar 2.4. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan menurut Alasan Utama Tidak Berobat Jalan Kabupaten Blora, 2016

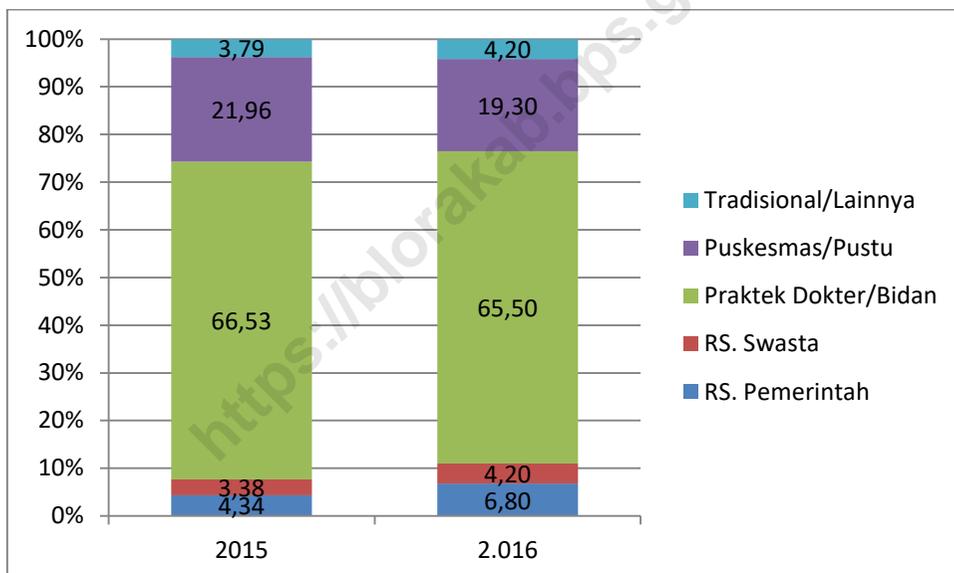


Sumber : Susenas 2016

Mayoritas penduduk yang berobat jalan telah memilih berobat pada fasilitas kesehatan yang dilayani oleh tenaga medis. Persentase penduduk yang berobat jalan ke praktek dokter/nakes/poliklinik mencapai 66,53 persen

pada tahun 2015, kemudian menurun menjadi 65,50 persen pada tahun 2016. Sementara itu persentase penduduk yang berobat jalan di Puskesmas/Pustu/UKBM menurun dari 21,96 persen pada tahun 2015 menjadi 19,30 persen pada tahun 2016. Hanya ada sekitar 4,20 persen penduduk yang melakukan pengobatan jalan ke praktek pengobatan tradisional/dukun bersalin/lainnya.

Gambar 2.5. Persentase Kunjungan Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat/Cara Berobat Kabupaten Blora, 2015-2016



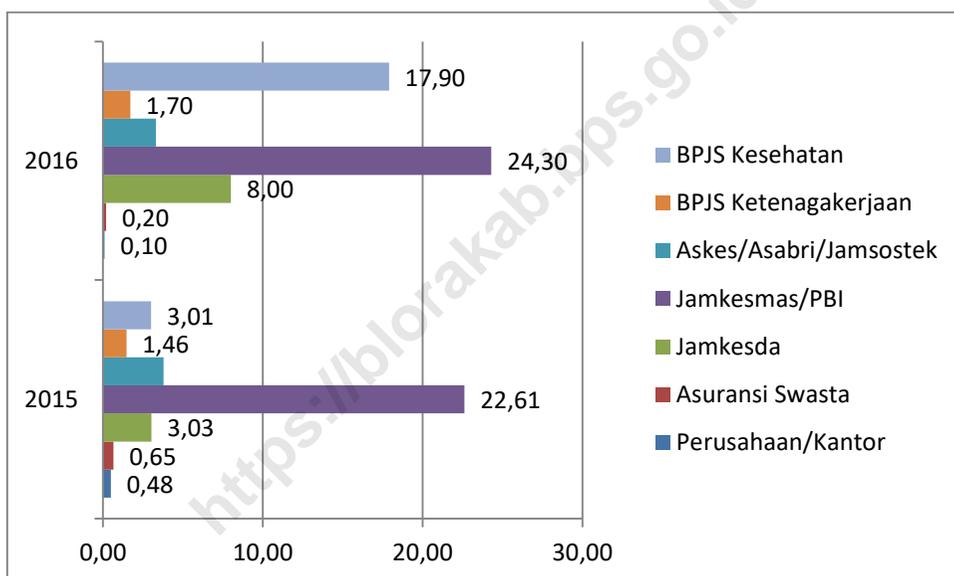
Sumber : Susenas 2015, 2016

### 2.3. Penggunaan Jaminan Kesehatan

Dalam rangka memberi keringanan akses biaya pengobatan khususnya bagi masyarakat kurang mampu, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk jaminan kesehatan. Dengan adanya jaminan kesehatan ini diharapkan fasilitas dan pelayanan kesehatan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 2.6 menunjukkan bahwa jaminan kesehatan yang paling banyak dimiliki masyarakat adalah Jamkesmas/PBI, yaitu mencapai 24,30 persen di tahun 2016. Meskipun demikian masih ada 44,50 persen penduduk yang belum memiliki jaminan kesehatan. Sementara itu, 31,20 persen penduduk memiliki jaminan kesehatan selain Jamkesmas/PBI.

Gambar 2.6. Persentase Penduduk menurut Jaminan Kesehatan yang Dimiliki Kabupaten Blora, 2015-2016



Sumber : Susenas 2015,2016

# BAB III

## PENDIDIKAN

**K**ualitas SDM dan kemampuan berdaya saing sangat berkaitan erat dengan pendidikan. Pendidikan menjadi investasi yang sangat penting untuk kemajuan bangsa. Upaya peningkatan kualitas pendidikan telah dilakukan dengan berbagai upaya seperti pembangunan sarana prasarana sekolah, program bantuan biaya sekolah dan berbagai macam beasiswa. Sampai saat ini sektor pendidikan masih menjadi prioritas dalam pembangunan karena masih banyaknya masalah mendasar dalam bidang pendidikan, diantaranya angka putus sekolah masih cukup tinggi dan kesenjangan mendapatkan kesempatan pendidikan.

### 3.1. Tingkat Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang, semakin luas pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Indikator tingkat pendidikan ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program wajib belajar 12 tahun yang dicanangkan pemerintah.

Berdasarkan tabel 3.1, berdasar ijazah yang dimiliki, pada tahun 2016 masih terdapat banyak penduduk berumur 15 tahun ke atas yang tidak menamatkan pendidikan sekolah dasar, yaitu mencapai 21,07 persen, dimana 19,71 persen adalah laki-laki dan 22,43 persen adalah perempuan. Penduduk yang telah mengenyam bangku pendidikan sebagian besar hanya mampu menamatkan sampai tingkat SD (39,49 persen). Semakin tinggi jenjang pendidikan tampak persentase yang semakin kecil pula. Hanya terdapat 0,89 persen penduduk yang menamatkan pendidikan diploma dan 3,88 persen yang menamatkan pendidikan sampai tingkat sarjana.

Berdasarkan jenis kelamin, secara umum pendidikan penduduk laki-laki terlihat lebih baik dibanding penduduk perempuan. Hal ini tampak dari lebih besarnya persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah sekolah dasar serta lebih kecilnya persentase penduduk perempuan yang menamatkan pendidikan tertentu (SLTA dan S1+). Persentase penduduk perempuan tercatat lebih tinggi dibanding laki-laki ada pada kategori tamat SD (39,70 persen dibanding 39,28 persen), tamat SLTP (18,83 persen dan 16,71 persen) dan Diploma I/II/III (0,95 persen dan 0,82 persen).

Tabel 3.1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Jenis Kelamin dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Kabupaten Blora, 2016

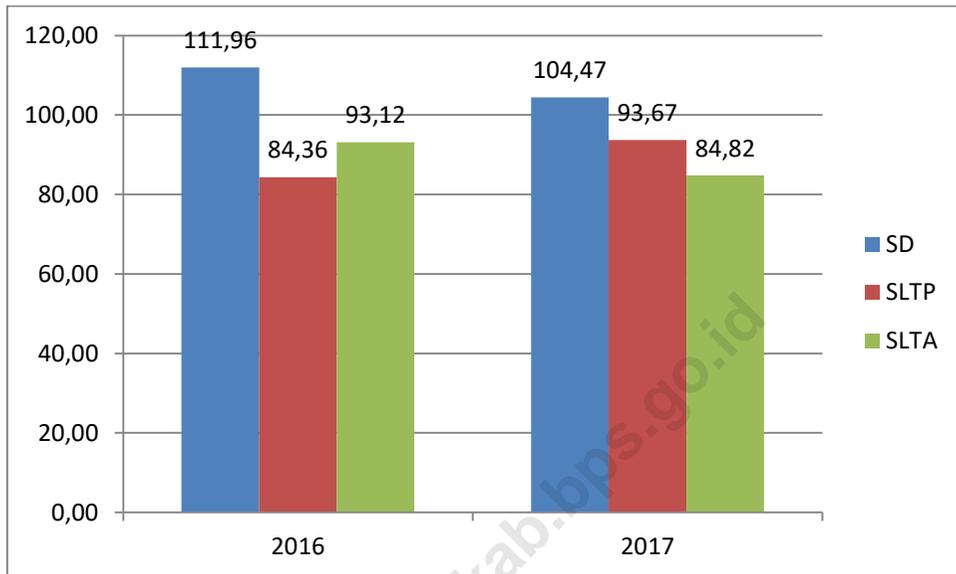
Pendidikan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1	2	3	4
Tidak Punya Ijazah	19,71	22,43	21,07
SD/MI	39,28	39,70	39,49
SMP/MTs	16,71	18,83	17,77
SM/MA	19,50	14,31	16,91
DI/DII/DIII	0,82	0,95	0,89
S1 +	3,98	3,77	3,88
Total	100,00	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016

### 3.2. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi Kasar (APK) merupakan rasio atau perbandingan jumlah siswa yang sedang sekolah pada tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Dengan demikian, besarnya APK bisa melebihi 100 persen karena angka ini tidak memperhatikan faktor umur. Kondisi ini menggambarkan adanya kemungkinan siswa yang tinggal kelas dan siswa terlambat atau terlalu cepat memasuki jenjang pendidikan tertentu.

Gambar 3.1. Angka Partisipasi Kasar  
Kabupaten Blora, 2016-2017



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

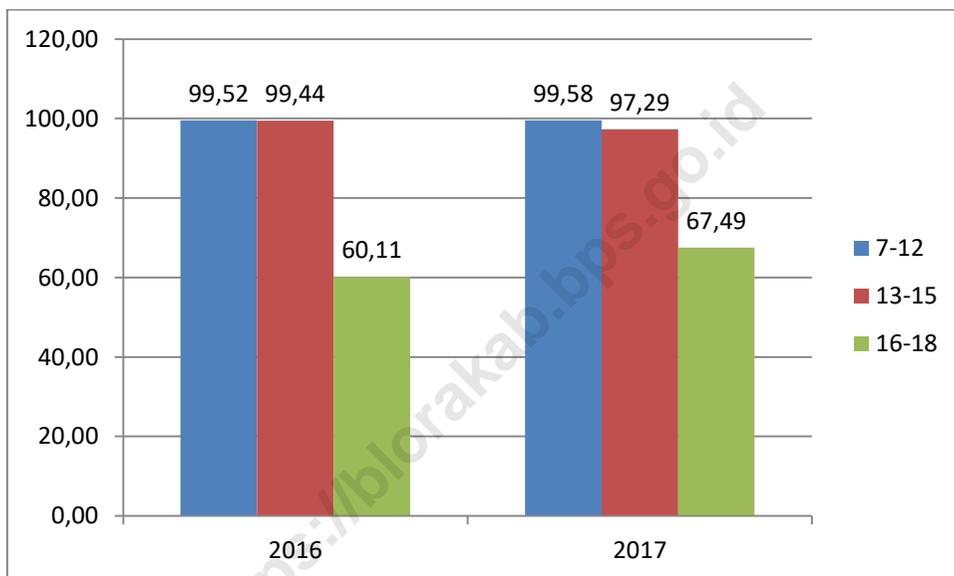
Grafik di atas menunjukkan APK SD/MI tahun 2017 sebesar 104,47 persen, lebih kecil dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 111,96 persen. Sementara untuk APK tingkat SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masing-masing sebesar 93,67 persen dan 84,82 persen. Dibandingkan tahun 2016, APK SLTP terlihat meningkat sedangkan jenjang pendidikan SMA/SMK/MA menurun dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 93,12 persen.

### 3.3. Angka Partisipasi Murni

Selain APK, Angka Partisipasi Murni (APM) dapat pula digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat partisipasi sekolah. APM adalah persentase jumlah anak pada kelompok umur tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok umur yang bersangkutan. Secara umum APM digunakan untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah

tepat waktu. Semakin tinggi APM berarti ada semakin banyak anak pada kelompok umur tertentu yang bersekolah sesuai dengan jenjang pendidikannya.

Gambar 3.2. Angka Partisipasi Murni  
Kabupaten Blora, 2016-2017



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

Selama kurun waktu 2016-2017 APM di Kabupaten Blora tercatat ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami peningkatan pada suatu jenjang pendidikan. Pada tahun 2017, APM SD/MI, APM SMP/MTs dan APM SMA/SMK/MA masing-masing mencapai 99,58 persen, 97,29 persen, dan 67,49 persen. Dimana APM SD/MI mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang tercatat 99,52 persen. APM SMP/MTs mengalami penurunan dibanding tahu sebelumnya yang tercatat sebesar 99,44 persen, dan APM SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 60,11 persen.

# BAB IV

## KETENAGAKERJAAN



masalah ketenagakerjaan masih menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Permasalahan ini diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya perluasan kesempatan kerja yang terbuka, rendahnya kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, dan sebagainya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri yang harus diselesaikan dalam program pembangunan. Tenaga kerja yang banyak dan melimpah belum merupakan jaminan bahwa daerah tersebut akan sejahtera.

### 4.1. Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja

Usia kerja yang digunakan untuk keperluan pengumpulan data ketenagakerjaan adalah usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja ini dibagi menjadi penduduk yang masuk sebagai angkatan kerja dan penduduk bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang ikut berpartisipasi dalam lapangan kerja, baik statusnya sudah bekerja maupun pengangguran. Sedangkan bukan angkatan kerja adalah mereka yang tidak terkait dengan kegiatan bekerja secara produktif, melainkan melakukan kegiatan seperti bersekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya.

Tabel 5.1 memperlihatkan bahwa penduduk umur 15 tahun ke atas pada bulan Agustus 2017 adalah sebanyak 667.457 orang, yang terdiri atas 468.609 orang angkatan kerja dan 198.848 orang bukan angkatan kerja. Jika dibandingkan dengan total penduduk umur 15 tahun ke atas, tampak bahwa jumlah tertinggi untuk kegiatan seminggu yang lalu adalah untuk penduduk

yang bekerja sebesar 455.270 orang, disusul oleh penduduk yang mengurus rumah tangga sebesar 127.307 orang.

Tabel 4.1. Penduduk 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu Kabupaten Blora, 2015 dan 2017

Uraian	2015	2017
(1)	(2)	(3)
Angkatan Kerja	465.039	468.609
Bekerja	443.275	455.270
Pengangguran	21.764	13.339
Bukan Angkatan Kerja	192.119	198.848
Sekolah	39.535	32.605
Mengurus Rumah Tangga	118.026	127.307
Lainnya	34.558	38.936
Jumlah	657.158	667.457

Sumber : Susenas 2015&2017

Ket : Tahun 2016 estimasi tidak bisa sampai angka Kabupaten

Gambar 4.1. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas menurut Kegiatan Utama Selama Seminggu yang Lalu Kabupaten Blora, 2015 dan 2017



Sumber : Susenas 2015&2017

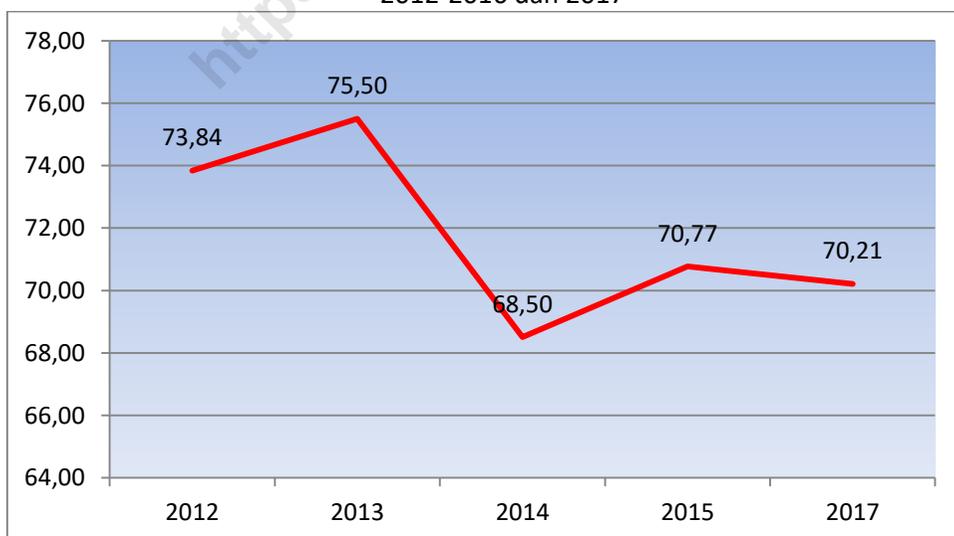
Ket : Tahun 2016 estimasi tidak bisa sampai angka Kabupaten

Secara proporsi, pada tahun 2017 terdapat 66,21 persen penduduk 15 tahun ke atas yang berpartisipasi aktif dalam lapangan pekerjaan dan 2,00 persen pengangguran. Dibandingkan dengan tahun 2015 terlihat bahwa persentase penduduk yang bekerja meningkat 0,76 persen. Sedemikian sehingga angka pengangguran juga ikut turun 1,31 persen. Sedangkan persentase bukan angkatan kerja meningkat dari 29,23 persen di tahun 2015 menjadi 29,79 persen di tahun 2017.

#### 4.2. TPAK dan TPT

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) biasa digunakan untuk menganalisis dan mengukur capaian hasil pembangunan yang berupa besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Indikator ini merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja.

Gambar 4.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Blora, 2012-2016 dan 2017



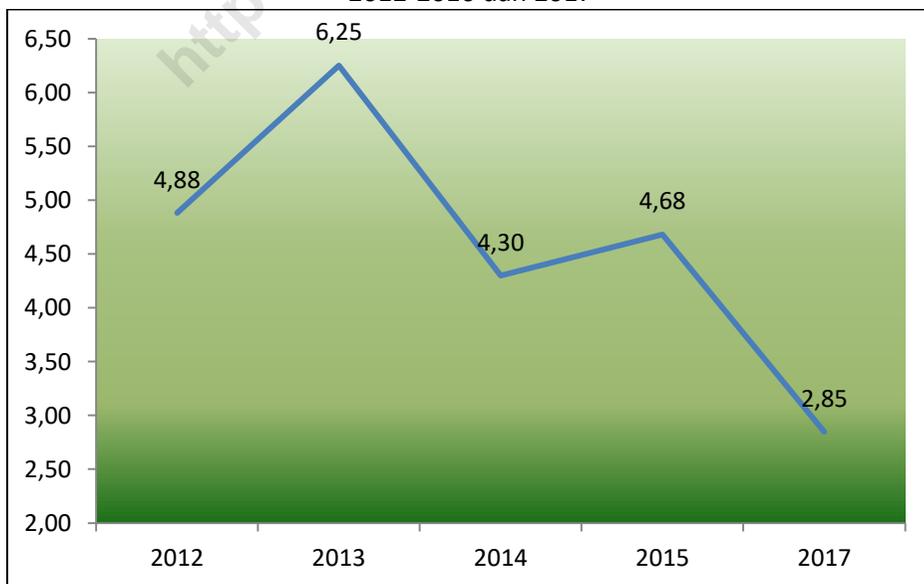
Sumber : Susenas 2012-2017

Ket : Tahun 2016 estimasi tidak bisa sampai angka Kabupaten

TPAK Blora dalam lima tahun terakhir cukup fluktuatif, pada tahun 2012 tercatat sebesar 73,84 persen kemudian meningkat menjadi 75,50 persen pada tahun 2013. Turun di tahun 2014, tahun 2015 naik lagi dan di tahun 2017 APK Blora tercatat sebesar 70,21 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) juga biasa digunakan dalam analisis angkatan kerja khususnya mengenai pengangguran. Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapat pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapat pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran terbuka ini tidak mencakup mereka yang bersekolah atau mengurus rumah tangga karena mereka tidak termasuk dalam angkatan kerja. Dengan demikian TPT merupakan perbandingan antara penduduk yang tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja.

Gambar 4.3. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Blora, 2012-2016 dan 2017



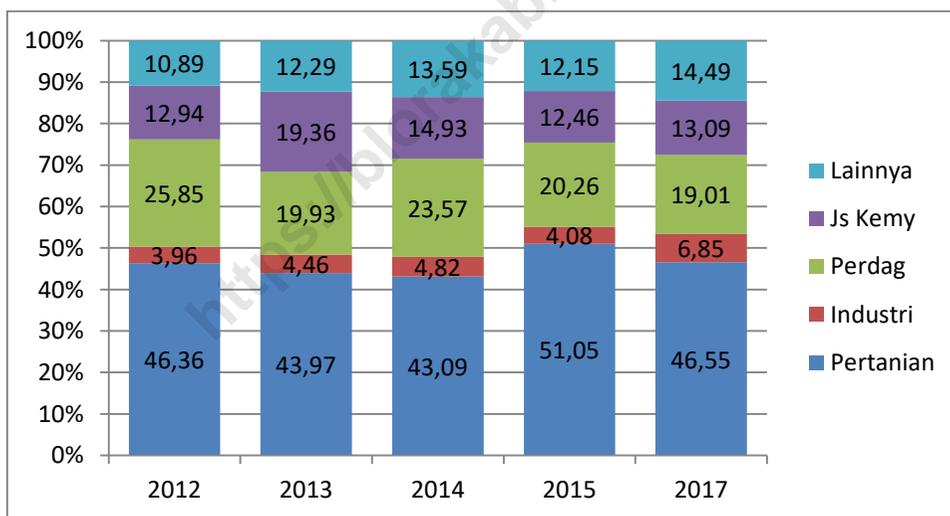
Sumber : Susenas 2014-2015

Ket : Tahun 2016 estimasi tidak bisa sampai angka Kabupaten

Kalau dilihat dari pola TPT Blora, ternyata memiliki pola yang mirip dengan TPAK. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2012-2017, TPT Blora cukup berfluktuatif. Pertanyaan yang muncul apakah karena kenaikan TPAK TPT juga ikut terpengaruh. Memang ada korelasi yang erat, ketika tingkat partisipasi angkatan kerjanya meningkat, dimungkinkan tingkat penganggurannya akan naik.

#### 4.3. Lapangan Pekerjaan Utama

Gambar 4.4. Persentase Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu menurut Lapangan Pekerjaan Utama Kabupaten Blora, 2012-2016 dan 2017



Sumber : Susenas 2012-2017

Ket : Tahun 2016 estimasi tidak bisa sampai angka Kabupaten

Gambar 5.4. berikut menggambarkan persentase masing-masing lapangan pekerjaan utama selama seminggu lalu. Secara umum, lapangan usaha Pertanian terlihat masih mendominasi penyerapan tenaga kerja di Blora, yakni mencapai 46,55 persen di tahun 2017. Prosentase ini terlihat

turun naik selama 5 tahun terakhir. Pernah mencapai prosentase tertinggi yaitu di tahun 2015, yang tercatat sebesar 51,05 persen.

Lapangan usaha kedua yang juga banyak ditekuni adalah sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, yaitu sebesar 19,01 persen. Prosentasenya menurun dibanding tahun sebelumnya. Sementara lapangan usaha yang sedikit menyerap tenaga kerja adalah Industri 6,85 persen di tahun 2017, meningkat prosentasenya dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 4,08 persen. Tumbuhnya industri di tahun-tahun tersebut tentunya berpengaruh terhadap penyerapan angkatan kerja.

<https://blorakab.bps.go.id>

# BAB V

## PERUMAHAN

Pembangunan perumahan dan pemukiman sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu dikembangkan secara terpadu. Perumahan merupakan kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal yang dilengkapi dengan sarana, prasarana dan fasilitas umum. Rumah dianggap sebagai kebutuhan dasar manusia, oleh karenanya juga menjadi penentu indikator kesejahteraan manusia.

Gambaran kondisi rumah juga dapat menjadi cerminan kondisi kesehatan penghuninya. Rumah yang sehat dengan kualitas baik akan membuat masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi. Sebaliknya, rumah yang tidak sehat memungkinkan masyarakat mudah terpapar penyakit. Kualitas rumah tinggal dipengaruhi oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan untuk membangun rumah. Beberapa kriteria kualitas rumah dapat dilihat dari hasil Susenas, seperti jenis atap, jenis dinding, jenis lantai, dan fasilitas penunjang lainnya.

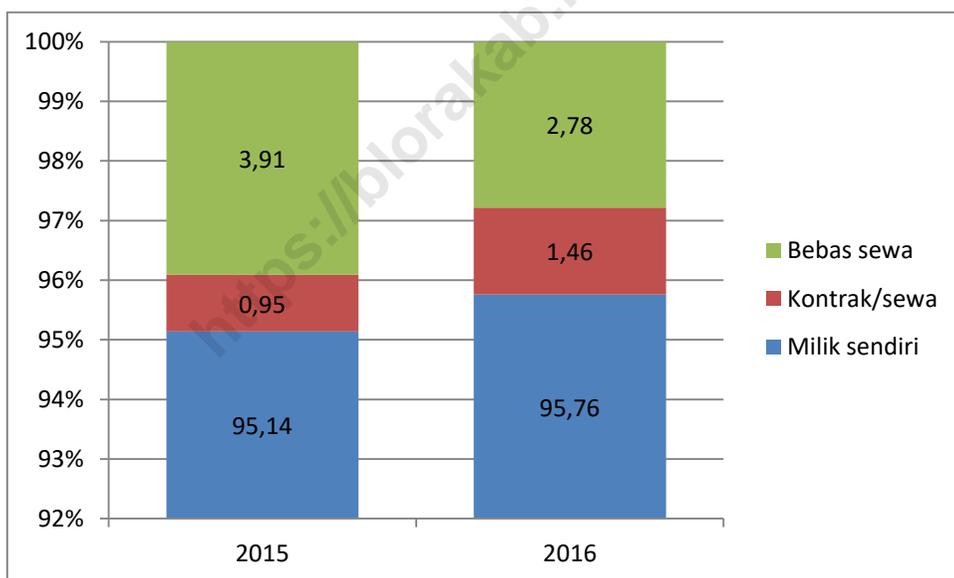
Untuk mengetahui kondisi kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status kepemilikan tempat tinggal, kualitas rumah tempat tinggal, serta fasilitas yang dimiliki.

### 5.1. Status Penguasaan Tempat Tinggal

Sebagai sebuah kebutuhan dasar, setiap rumah tangga akan berusaha memenuhi kebutuhan perumahan dengan berbagai cara. Kondisi ekonomi masing-masing rumah tangga akan mempengaruhi tingkat kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ini. Mereka yang berpenghasilan lebih tinggi akan mempunyai kesempatan untuk memiliki rumah dengan lebih mudah dibanding mereka yang berpenghasilan rendah.

Sebagian besar rumah tangga di Blora pada tahun 2016 telah menempati rumah dengan status milik sendiri (95,76 persen). Persentase ini meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 95,14 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga yang tidak menempati rumah milik sendiri menurun dari 4,86 persen pada tahun 2015 menjadi 4,42 persen pada tahun 2016, dimana 2,78 persen menempati rumah dengan status bebas sewa, dan 1,46 persen sisanya adalah mereka yang menempati rumah dengan status kontrak/sewa/dinas.

Gambar 5.1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Blora, 2015-2016



Sumber : Susenas 2015-2016

## 5.2. Kualitas Rumah Tempat Tinggal

Kualitas rumah tinggal yang dapat dikategorikan sebagai rumah layak huni memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria ini mencakup

kelayakan pada atap, dinding serta lantai yang dimiliki rumah tinggal tersebut.

Atap menjadi salah satu bagian penting dari sebuah tempat tinggal karena berfungsi sebagai pelindung dari hujan maupun panas. Oleh karena itu atap biasanya dipilih dari bahan yang dapat melindungi secara maksimal. Atap dikatakan layak apabila terbuat dari beton, genteng, sirap, seng atau asbes. Meskipun demikian, jenis atap tidak selamanya menggambarkan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Pemilihan jenis atap dapat dipengaruhi oleh preferensi masyarakat suatu daerah sesuai kondisi geografisnya.

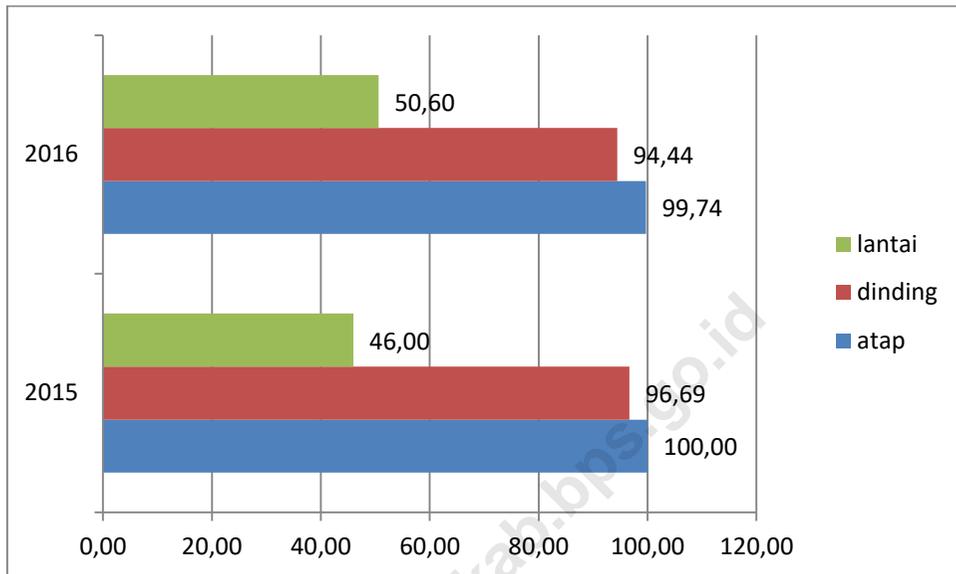
Dinding yang baik biasanya terbuat dari bahan yang kedap air sehingga dinding tidak lembab atau basah dan tidak berlumut. Dengan demikian standar kesehatan akan terpenuhi. Rumah dikatakan layak huni di antaranya jika dinding terbuat dari tembok atau kayu.

Ditinjau dari segi kesehatan, rumah dengan lantai dari tanah dianggap kurang layak huni. Urutan dari yang paling baik untuk lantai bukan tanah menurut kualitasnya adalah keramik/marmer/granit, ubin/tegel/teraso, semen/bata merah, kayu/papan, bambu dan lainnya.

Secara umum, kondisi perumahan di Blora relatif memenuhi kriteria rumah layak huni. Hal ini dapat dilihat dari data Susenas 2015 dan 2016. Keseluruhan rumah di Blora telah memiliki atap yang layak. 100 persen di tahun 2015, tetapi hampir 100 di tahun berikutnya.

Persentase rumah yang berdinding layak (terbuat dari tembok atau kayu) di Blora menunjukkan penurunan meskipun sangat kecil. Pada tahun 2015, rumah tangga yang menggunakan dinding tembok atau kayu sebesar 96,69 persen menjadi 94,44 persen pada tahun 2016. Ada penurunan prosentase kualitas dinding di tahun 2016. Tetapi rumah yang memiliki lantai bukan tanah terlihat meningkat dengan jumlah yang cukup signifikan, yaitu dari 46,00 persen di tahun 2015 menjadi 50,60 persen di tahun 2016.

Gambar 5.2. Persentase Rumah Tangga menurut Kualitas Perumahan Kabupaten Blora, 2015-2016



Sumber : Susenas 2015-2016

Indikator lain yang digunakan untuk melihat kualitas perumahan untuk tempat tinggal adalah luas lantai hunian. Rumah dengan luas lantai yang memadai akan memberi keluasaan aktivitas dan kenyamanan bagi penghuninya.

Data tahun 2015 dan 2016 menunjukkan lebih dari 90 persen rumah di Blora memiliki luas lebih dari 54 m<sup>2</sup>. Mungkin karena karakteristik wilayah Blora yang sebagian besar merupakan wilayah perdesaan. Meskipun demikian, persentase rumah dengan luas kurang dari 21 m<sup>2</sup> tampak masih ada walaupun prosentasenya cukup kecil. Prosentase luas rumah yg <21 m<sup>2</sup>, mengalami penurunan dari 1,35 persen pada tahun 2015 menjadi 0,40 persen pada tahun 2016.

Gambar 5.3. Persentase Rumah Tangga menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal Kabupaten Blora, 2015-2016



Sumber : Susenas 2015-2016

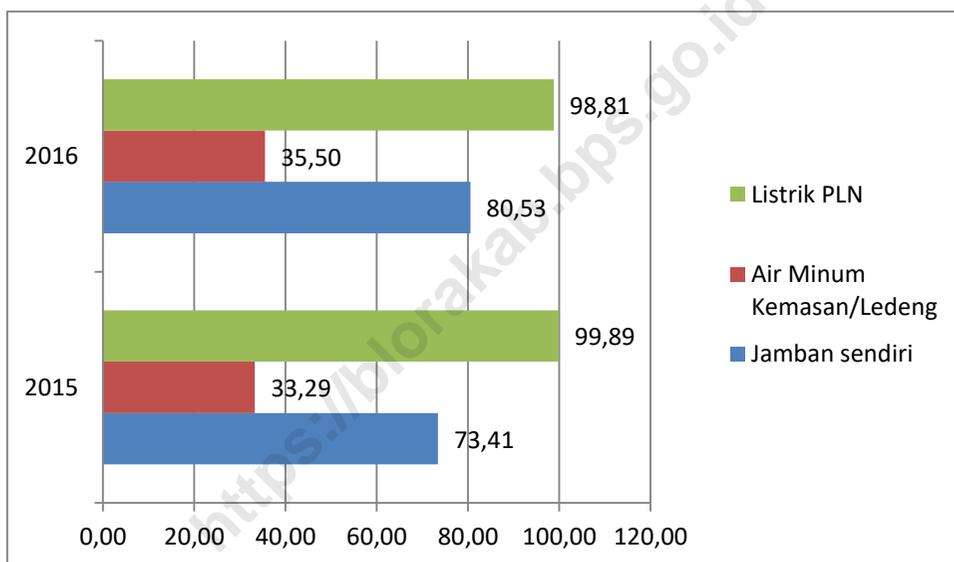
### 5.3. Fasilitas Rumah Tempat Tinggal

Kualitas dan kenyamanan rumah tinggal juga dipengaruhi oleh seberapa banyak fasilitas yang dimiliki rumah tersebut. Beberapa fasilitas mendasar yang seyogyanya dimiliki tiap rumah diantaranya adalah tersedianya air bersih, memiliki sanitasi yang baik dan penerangan yang cukup. Kelengkapan fasilitas ini dapat pula menjadi tolok ukur kesejahteraan rumah tangga yang menempatinnya.

Sumber penerangan yang ideal adalah listrik, baik yang berasal dari PLN maupun Non PLN, karena cahaya dari listrik lebih terang dibandingkan

dengan sumber penerangan lainnya. Penggunaan fasilitas penerangan listrik sudah dimanfaatkan oleh hampir seluruh penduduk. Pada tahun 2015, 99,89 persen rumah tangga menggunakan sumber listrik PLN, tetapi di tahun 2016 persentasenya turun menjadi 98,81 persen, atau 1,19 persen sisanya menggunakan sumber listrik bukan dari PLN. Kemungkinan adanya pembangunan rumah baru yang belum bisa dialiri listrik dari PLN.

Gambar 5.4. Persentase Rumah Tangga menurut Fasilitas Perumahan Kabupaten Blora, 2015-2016



Sumber : Susenas 2015-2016

Ketersediaan air minum merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga. Pada tahun 2015, terdapat 33,29 persen rumah tangga yang telah menggunakan air minum kemasan, atau air minum isi ulang dan ledeng. Kemudian pada tahun 2016, persentase ini meningkat menjadi 35,50 persen.

Kepemilikan jamban pada suatu rumah tangga mencerminkan usaha sanitasi yang dilakukan rumah tangga tersebut. Persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas jamban sendiri menunjukkan peningkatan yaitu dari 73,41 persen pada tahun 2015 menjadi 80,53 persen pada tahun 2016.

# BAB VI

## POLA KONSUMSI



ola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator dalam mengukur tingkat kesejahteraan. Besarnya pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi makanan dapat menggambarkan kesejahteraan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, biasanya akan semakin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain, pengeluaran non makanan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi akan lebih besar.

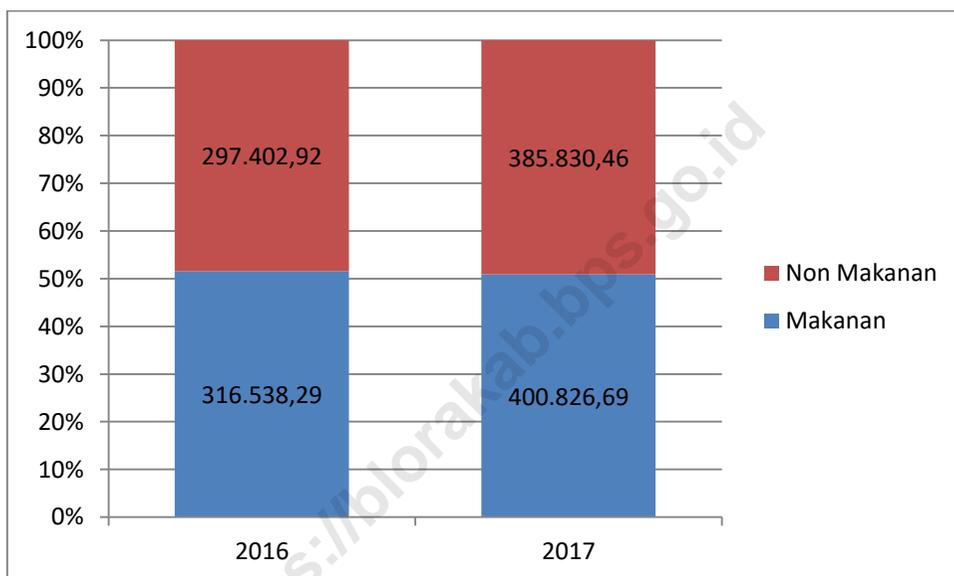
Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluarannya. Hal ini terjadi karena pada umumnya elastisitas permintaan terhadap makanan cukup rendah, sedangkan elastisitas permintaan terhadap non makanan cukup tinggi. Pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi makanannya sudah mencapai titik jenuh, pendapatan yang meningkat akan digunakan untuk konsumsi barang non makanan atau ditabung. Dengan demikian pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, dimana perubahan komposisinya digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

### 6.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rata-rata per kapita sebulan merupakan hasil bagi antara total pengeluaran konsumsi seluruh penduduk selama sebulan dengan jumlah penduduk. Selama periode 2016-2017 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Blora meningkat dari Rp. 613.941 menjadi Rp. 786.657. Bila dilihat berdasarkan jenis pengeluarannya, persentase pengeluaran untuk barang bukan makanan mengalami kenaikan dari Rp. 297.403 menjadi Rp.

385.830. Demikian juga dengan pengeluaran untuk makanan meningkat cukup signifikan dari Rp. 316.538 menjadi Rp. 400.827.

Gambar 6.1. Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan (dalam Rupiah) menurut Jenis Pengeluaran Kabupaten Blora, 2016-2017



Sumber : Susenas 2016-2017

Tabel 6.1. menunjukkan persentase konsumsi rata-rata per kapita untuk berbagai jenis komoditas. Selama periode 2016-2017 secara umum terjadi penurunan konsumsi makanan dari 51,54 persen menjadi 50,95 persen. Sementara itu, pengeluaran barang non makanan mengalami peningkatan dari 48,44 persen pada tahun 2016 menjadi 49,05 persen pada tahun 2017.

Tabel 6.1. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan menurut Kelompok Komoditas Kabupaten Blora, 2016-2017

Jenis Komoditas	2014	2015
1	2	3
<b>Makanan</b>	<b>51,54</b>	<b>50,95</b>
Padi-padian	7,83	6,21
Umbi-umbian	0,10	0,16
Ikan	1,51	1,44
Daging	1,48	1,70
Telur dan Susu	2,80	2,55
Sayur-sayuran	5,02	5,06
Kacang-kacangan	1,98	1,66
Buah-buahan	1,78	2,18
Minyak dan Lemak	1,86	1,71
Bahan Minuman	1,81	1,56
Bumbu-bumbuan	1,04	1,01
Konsumsi Lainnya	1,26	1,31
Makanan dan Minuman Jadi	16,01	18,63
Minuman Beralkohol	0,00	0,01
Tembakau dan Sirih	7,06	5,76
<b>Non Makanan</b>	<b>48,44</b>	<b>49,05</b>
Perumahan dan Fasilitas Rumah tangga	17,12	12,25
Barang dan Jasa	17,48	14,83
Pakaian, Alas Kaki dan Tutup Kepala	2,46	9,17
Barang Tahan Lama	7,95	7,07
Pajak, Pungutan, dan Asuransi	1,57	4,01
Keperluan Pesta dan Upacara	1,86	1,72
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas 2016-2017

# BAB VII

## KEMISKINAN

Fenomena kemiskinan telah berlangsung sejak lama, walaupun telah dilakukan berbagai upaya dalam menanggulangnya, namun sampai saat ini masih terdapat lebih dari 1,2 milyar penduduk dunia yang hidup dengan pendapatan kurang dari satu dolar perhari dan lebih dari 2,8 milyar penduduk dunia hanya berpenghasilan kurang dari dua dolar perharinya. Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropa. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran. Berikut sedikit penjelasan mengenai kemiskinan yang sudah menjadi dilema mengglobal yang sangat sulit dicari cara pemecahan terbaiknya. (<http://imdadillahrifani.blogspot.co.id>).

Dibanyak negara upaya penurunan angka kemiskinan dilakukan dengan memacu angka pertumbuhan ekonomi. Tetapi pertumbuhan ekonomi saja tidak akan cukup untuk mengentaskan kemiskinan jika tidak diiringi dengan pendistribusian atau pemerataan hasil-hasil pembangunan. Sampai saat ini banyak program-program yang telah ditelorkan pemerintah dalam rangka untuk mengurangi angka kemiskinan, tetapi hasilnya belum seperi yang diharapkan. Pengurangan kemiskinan berjalan lambat. Banyak faktor yang

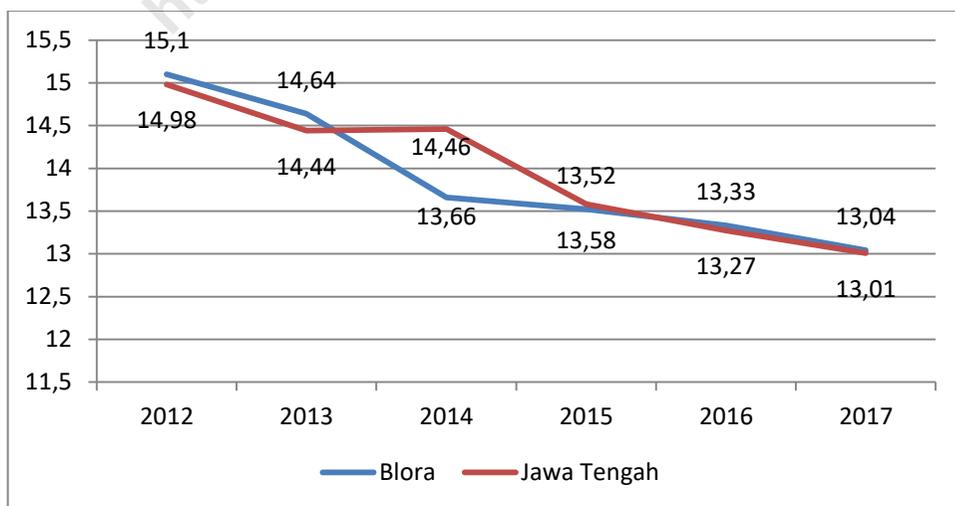
mempengaruhi, bukan hanya sekedar memberik kail bagi si miskin, tetapi perubahan budaya, pola pikir dan semangat untuk maju juga perlu terus ditanamkan.

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya.

### 7.1. Perkembangan Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Blora menunjukkan tren menurun selama periode 2012-2017. Tahun 2017, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 112 ribu jiwa atau 13,04 persen dari jumlah seluruh penduduk Blora. Secara nominal, angka tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 114 ribu jiwa atau 13,33 persen.

Gambar 7.1. Prosen Penduduk Miskin Kabupaten Blora (%) Tahun 2012-2017



Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

## 7.2. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan digunakan sebagai batas untuk mengelompokkan penduduk miskin dan tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Blora mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun 2012 hingga 2017. Pada tahun 2012, garis kemiskinan di Blora sebesar Rp. 221.088 kemudian meningkat menjadi Rp. 237.850 pada tahun 2013 hingga kemudian menjadi Rp. 291.114 pada tahun 2017. Meningkatnya garis kemiskinan dipengaruhi oleh meningkatnya gaya hidup penduduk serta meningkatnya harga kebutuhan pokok dari tahun ke tahun. Jika diperhatikan, nilai garis kemiskinan di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada di perdesaan. Hal tersebut dipengaruhi tingginya harga kebutuhan pokok yang biasanya harus didatangkan dari daerah perdesaan.

**Tabel 7.1. . Garis Kemiskinan di Kabupaten Blora  
dan Jawa Tengah Tahun 2012-2017  
(Rupiah/Kapita/Bulan)**

<b>Tahun</b>	<b>Blora</b>	<b>Jawa Tengah</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>
2012	221.088	233.769
2013	237.850	261.881
2014	248.903	273.056
2015	257.581	297.851
2016	279.972	317.348
2017	291.114	333.224

Sumber : BPS Jawa Tengah, 2018

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN BLORA  
JL. Rajawali No. 12 Blora telp (0296)531191  
Email : [bps3316@bps.go.id](mailto:bps3316@bps.go.id) hppt:\\blorakab.bps.go.id